

# STRATEGI PEMBERDAYAAN UMKM DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Fariz Muhammad Haikal<sup>1</sup>, Sri Murtiana<sup>2</sup>, Haetami<sup>3</sup>  
Universitas Pertahanan Republik Indonesia  
Corresponding e-mail: [farizmuhammadhaikal@gmail.com](mailto:farizmuhammadhaikal@gmail.com)

Copyright © 2025 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

DOI: [10.53866/jimi.v5i6.1064](https://doi.org/10.53866/jimi.v5i6.1064)

## *Abstrak*

UMKM di Indonesia berkontribusi sebesar 60% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. UMKM pun menyumbang mayoritas lapangan kerja bagi masyarakat sebesar 97%. Namun, pengembangan dari UMKM belum maksimal terdapat kendala seperti akses yang tidak merata bagi UMKM, minimnya permodalan untuk tujuan inovasi yang dilakukan, tingkat literasi keuangan rendah, dan UMKM sulit melepaskan sifat kekeluargaan/tradisional sehingga sulit untuk berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan kualitatif konsep teori strategi yang dikembangkan oleh Arthur F. Lykke dengan membagi dalam 3 elemen yaitu *ends*, *ways*, dan *means*. Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan pendekatan holistik yang mencakup beberapa pilar utama yaitu peningkatan kapasitas manusia, perluasan akses, dan dukungan ekosistem melalui regulasi. Keberhasilan pemberdayaan UMKM adalah kunci untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Strategi Pemberdayaan, UMKM, Kontribusi, Pertumbuhan Ekonomi*

## *Strategies For Empowering Small And Medium Enterprises to Boost Indonesia's Economic Growth*

### *Abstract*

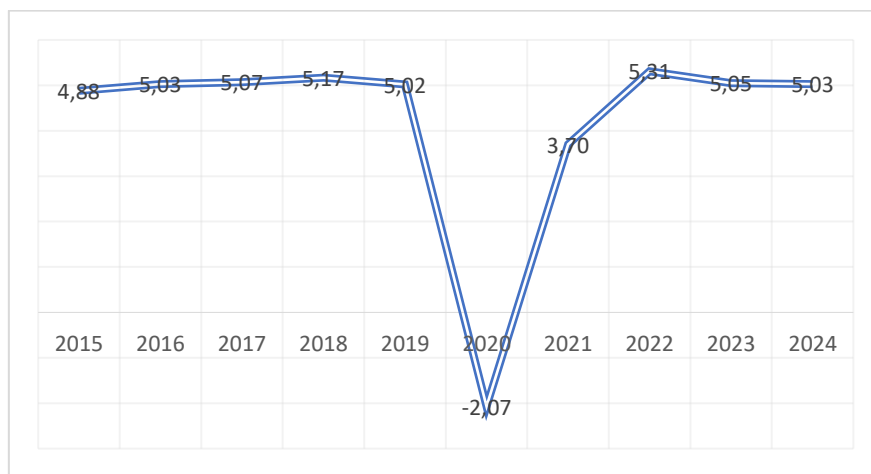
MSMEs in Indonesia contribute 60% to the country's economic growth. MSMEs also provide the majority of employment opportunities for the public, accounting for 97%. However, the development of MSMEs is not yet optimal, facing constraints such as unequal access, minimal capital for intended innovation, a low level of financial literacy, and the difficulty for MSMEs to move beyond a familial/traditional nature, which hinders their growth. This research aims to analyse the strategy implemented for the empowerment of MSMEs to enhance economic growth, utilizing a qualitative approach based on the strategic concept theory developed by Arthur F. Lykke, which is divided into three elements: *ends*, *ways*, and *means*. This study is a descriptive analysis research. The research affirms that a holistic approach is necessary, encompassing several main pillars: enhancing human capacity, expanding access, and providing ecosystem support through regulation. The successful empowerment of MSMEs is key to realizing inclusive and sustainable economic growth.

**Keywords:** *Strategies, MSME, Contribution, Economic Growth*

### 1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi yang kokoh di Indonesia adalah fondasi penting untuk kemajuan bangsa. Ketika ekonomi tumbuh, pendapatan per kapita masyarakat akan meningkat dan memungkinkan mereka untuk memiliki daya beli yang lebih tinggi serta akses lebih baik terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Tujuan akhir yang ingin dicapai pada akhirnya adalah meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga menjadi motor penggerak investasi dan ekspansi bisnis, yang secara langsung menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Dengan terbukanya lapangan kerja, tingkat pengangguran dapat ditekan, memberikan kesempatan bagi lebih banyak individu untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi dan mendapatkan penghasilan. Untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi yang optimal, berkelanjutan, dan dapat memberikan dampak maksimal kepada seluruh masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Triwulan 4-2024 pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,03%.

**Grafik 1.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2015-2024**



Sumber: BPS (2025)

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang stabil di kisaran 4-5% dari 2015 hingga 2019, dengan titik tertinggi pada periode tersebut di angka 5,17% pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2020, ekonomi mengalami kontraksi tajam ke titik terendah yaitu -2,07%, kemungkinan besar akibat pandemi. Setelah itu, ekonomi pulih pesat, mencapai tingkat pertumbuhan tertinggi secara keseluruhan di 5,31% pada tahun 2022, dan diproyeksikan stabil di sekitar 5% pada tahun 2023 dan 2024, menunjukkan resiliensi yang kuat pasca-pandemi. Ditambah lagi dengan optimisme pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo yang menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% di Tahun 2029. Hal ini membutuhkan rencana strategis untuk mencapai target tersebut.

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Periode 2018-2025**

Tahun	TPT (%)
2018	5,81
2019	5,01
2020	4,94
2021	6,26
2022	5,83
2023	5,4
2024	4,91
2025 (Feb)	4,76

Sumber: BPS (2025)

Kementerian Keuangan RI mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat mampu memicu penciptaan lapangan kerja nasional. Pada Bulan Februari 2025, jumlah pekerja yang terdata mencapai 153,05 juta orang, naik sebesar 3,67 juta jika dibandingkan dengan Bulan Februari 2024 sebesar 139,85 juta orang. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Bulan Februari 2025 turun ke 4,76%, dibandingkan sebelumnya 4,91% pada Bulan Agustus 2024. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan ekonomi tidak hanya berdampak pada peningkatan jumlah tenaga kerja, tetapi juga mampu menekan tingkat pengangguran, sehingga menciptakan kondisi pasar kerja yang lebih sehat dan mendukung pertumbuhan inklusif.

Sebagai salah satu negara berkembang yang ada di dunia, UMKM merupakan andalan utama Indonesia dalam mendukung perekonomian nasional dan menjadi inti dari pertumbuhannya. Berdasarkan data Asia Development Bank (ADB), UMKM di Indonesia berkontribusi sebesar 60% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. UMKM pun menyumbang mayoritas lapangan kerja bagi masyarakat sebesar 97%. Namun, pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih belum optimal karena pengusaha di bidang ini memerlukan kemampuan dalam bidang digitalisasi. Di samping itu, para pelaku UMKM menghadapi tantangan umum, yakni keterbatasan akses yang signifikan ke sumber pendanaan, data, dan kompetensi.

Data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Kemenkop UKM) Tahun 2021 menyebutkan sektor UMKM mampu menyerap sebanyak 117 juta tenaga kerja, yang setara dengan 97% dari total kapasitas penyerapan tenaga kerja di dunia bisnis. Selain itu berdasarkan data dari sumber yang sama hingga 31 Desember 2024, terdapat sekitar 30,18 juta unit UMKM yang terdaftar di Indonesia. Namun, jumlah tersebut tidak mencakup UMKM yang berasal dari sektor pertanian, pemerintahan, jasa, dan sektor lainnya. UMKM memainkan peran vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. UMKM berkontribusi signifikan dalam penyerapan tenaga kerja dan berfungsi sebagai sektor yang dapat menyebarkan hasil pembangunan (Novitasari 2021). Sementara, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyumbang 61,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara, sedangkan 38,9% sisanya berasal dari perusahaan skala besar yang jumlahnya hanya 5.550 unit, atau setara dengan 0,01% dari total pengusaha di Indonesia.

Berdasarkan hal di atas, perkembangan UMKM berpengaruh positif dalam perekonomian Indonesia, dalam hal ini pertumbuhan ekonomi. Namun UMKM juga memiliki kendala dalam perkembangannya. Akses yang tidak merata bagi UMKM sehingga tidak mendapatkan informasi dan bantuan-bantuan yang disediakan pemerintah atau organisasi lainnya. Minimnya permodalan yang dilakukan sehingga sulit untuk berinovasi. Tingkat pendidikan rata-rata pelaku UMKM yang cenderung tidak tinggi. Data terakhir yang dikeluarkan oleh BPS Tahun 2023 menunjukkan mayoritas tingkat pendidikan pengusaha industri menengah kebawah adalah tingkat sekolah dasar. Hal ini sangat beresiko memberikan pengaruh dan dampak yang kurang baik dalam pertumbuhan UMKM secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak potensi yang dapat ditingkatkan bagi para pelaku UMKM untuk jauh lebih berkembang dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar dalam rangka meningkatkan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menyusun berbagai regulasi yang mengatur UMKM dari perizinan sampai dengan kemudahan UMKM dalam melakukan usahanya. Mulai dari berbagai program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), didukung dengan adanya kebijakan pemerintah antara lain PP Nomor 7 Tahun 2021, Undang-undang Cipta Kerja, dan Inpres Nomor 2 Tahun 2022. Namun banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku usaha.

**Tabel 1.2**  
**Penyaluran Kredit UMKM**

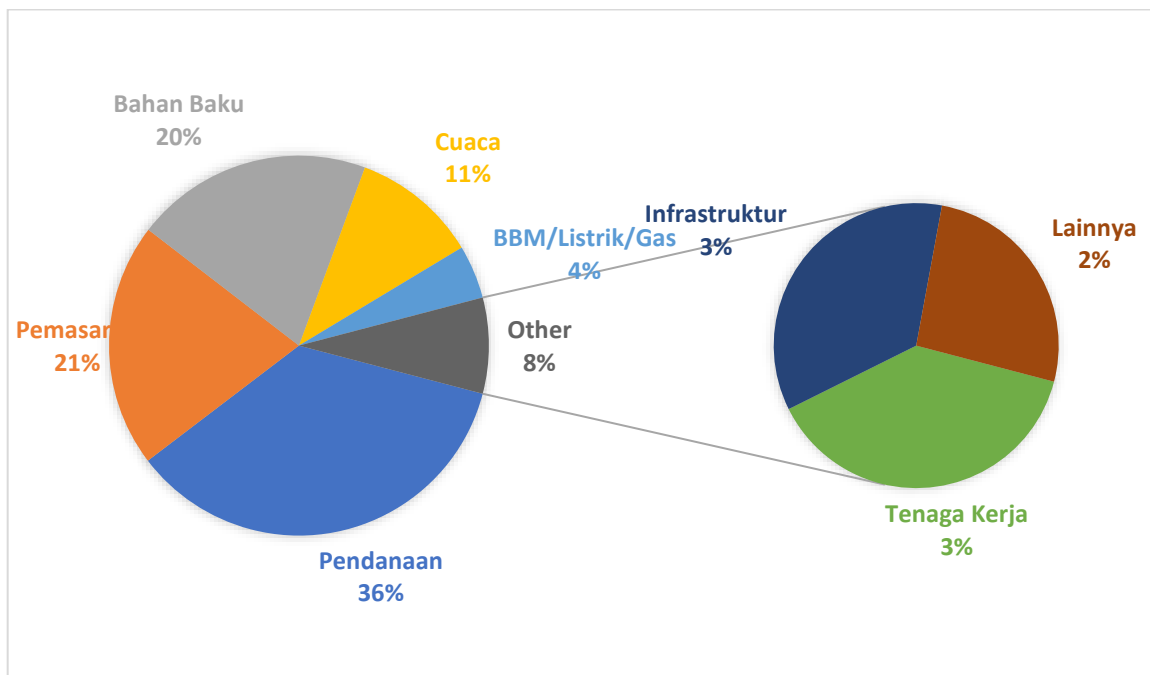
Tahun	Jumlah Kredit (Rp)	Jumlah Kredit keseluruhan (Rp)	Persentase (%)
2017	882.982	4.735.387	18,65%
2018	969.972	4.494.416	21,58%
2019	1.107.240	4.830.789	22,92%
2020	1.088.333	4.723.761	23,04%
2021	1.221.015	4.955.703	24,64%

Tahun	Jumlah Kredit (Rp)	Jumlah Kredit keseluruhan (Rp)	Persentase (%)
2022	1.348.813	5.475.409	24,63%
2023	1.457.132	6.082.640	23,96%

Sumber: BPS (2024)

Besarnya pinjaman yang dilakukan oleh UMKM selama periode 2017-2023 hanya di kisaran 18-25% dari total pinjaman yang dilakukan kepada bank konvensional. Padahal UMKM berkontribusi terhadap 97% tenaga kerja yang menyumbang pertumbuhan ekonomi secara makro. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kontribusi UMKM terhadap tenaga kerja dan akses mereka terhadap pembiayaan. Meskipun UMKM menyerap sebagian besar tenaga kerja, mereka masih menghadapi tantangan dalam mendapatkan pinjaman yang memadai untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka. Hal tersebut diperkuat dari data BPS mengenai Profil Industri Mikro Dan Kecil 2023 yang dirilis 2024 menyatakan sebanyak 1.802.227 perusahaan industri mikro dan kecil atau 35,56% mengalami masalah dalam pendanaan modal.

**Grafik 1.2**  
**Permasalahan Industri Menengah dan Kecil**



Sumber: BPS (2024)

Beberapa penelitian sebelumnya hanya fokus pada salah satu aspek pemberdayaan, seperti pendanaan atau pelatihan, tanpa mempertimbangkan hubungan antara cara (Ways), sumber daya (Means), dan hasil akhir (Ends) sebagaimana teori strategi yang dicetuskan oleh Arthur F. Lykke. Penelitian ini berupaya mengintegrasikan ketiga aspek tersebut untuk menghasilkan strategi yang efektif. UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian dan penyedia mayoritas lapangan kerja, masih menghadapi berbagai kendala seperti akses terbatas terhadap pendanaan, kurangnya informasi, serta keterampilan digital yang belum memadai. Data Profil Industri Mikro Dan Kecil 2023 menyatakan hanya 1.656.743 dari 4.500.584 pelaku usaha atau sebesar 36,81% yang menggunakan internet dalam melakukan usahannya. Dan hanya 18,64% yang memasarkan produknya di internet.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi dan program untuk mendukung UMKM, banyak di antaranya belum dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menemukan solusi efektif dalam mengatasi kendala-kendala ini dan memaksimalkan potensi UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

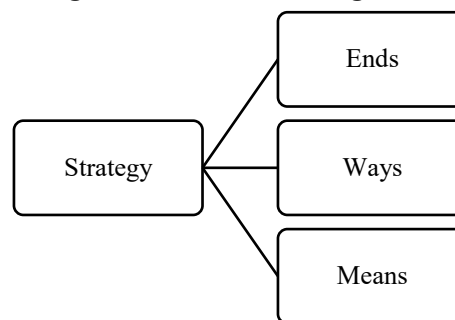
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana cara UMKM dalam rangka meningkatkan lapangan kerja, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), kapasitas produksi

dan inovasi, serta kesejahteraan ekonomi lokal. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai cara yang dapat digunakan, termasuk pelatihan dan pengembangan keterampilan, akses terhadap pendanaan, dan adopsi teknologi digital. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi sumber daya yang tersedia dan bagaimana sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan pendekatan holistik ini, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi strategi yang efektif untuk mencari solusi yang akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif berbasis literatur, yang bertujuan untuk menganalisis dampak digitalisasi dan literasi keuangan terhadap perkembangan UMKM dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur deskriptif untuk menganalisis strategi pemberdayaan UMKM. Fokus utama dari tinjauan literatur kualitatif ini adalah berpusat pada pengumpulan, penilaian, dan konsolidasi pengetahuan yang ada terkait dengan subjek yang diminati, khususnya peningkatan keahlian di bidang UMKM. Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan, termasuk jurnal akademis, buku, dan berbagai artikel. Cakupan temporal pengumpulan data berkisar dari tahun 2018 hingga 2024, memungkinkan peneliti untuk mengamati transformasi, tren, dan perkembangan yang terjadi selama periode ini. Penelitian ini mengacu pada tiga elemen teori strategi yang dikemukakan oleh Arthur F. Lykke, yaitu tujuan (ends), cara (ways), dan sumber daya (means).

**Grafik 1.3**  
**Diagram Model Teori Strategi Arthur F. Lykke**



Sumber: Lykke (1989)

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Mankiw dkk. (2014) Salah satu ukuran krusial dalam menilai perkembangan ekonomi sebuah negara adalah laju pertumbuhan ekonominya. Indikator tersebut menunjukkan sejauh mana stabilitas ekonomi yang telah dicapai melalui berbagai kebijakan pemerintah sebagai respon dari fenomena-fenomena ekonomi yang terjadi dan sebagai pedoman untuk menentukan kebijakan dan program apa yang akan dipertimbangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan sektor ekonomi yang belum optimal demi kesejahteraan warganya. Pertumbuhan ekonomi sering dianggap sebagai elemen paling krusial dalam strategi kebijakan ekonomi di berbagai negara atau model sistem ekonomi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pertumbuhan tersebut berperan sebagai salah satu ukuran peningkatan kesejahteraan masyarakat (Saputro & Meirinaldi, 2021). Selain itu, hasil penghitungan tingkat pertumbuhan ekonomi dapat digunakan oleh untuk meyakinkan kepada warga negaranya akan keberhasilan dari kebijakan-kebijakan yang telah disusun serta meningkatkan rasa nasionalisme dan kebanggaan dari warga negara.

### Ends (Tujuan)

Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Hidayat dkk. (2022) peran utama yang dimiliki oleh UMKM dalam kegiatan ekonomi yaitu pencipta lapangan kerja, penyedia pasar baru, pemeran utama dalam pemberdayaan masyarakat dan perekonomian lokal, dan kontribusi besarnya terhadap neraca pembayaran dan PDB suatu negara. Keberadaan UMKM juga memperkuat perekonomian lokal dengan memberikan peluang usaha yang lebih merata bagi berbagai lapisan masyarakat. UMKM sering kali beroperasi di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh penyedia dengan kapasitas yang besar, sehingga mampu mendistribusikan hasil pembangunan secara lebih adil dan merata.

Selain itu pada penelitian lain mengungkapkan bahwa semua kualitas layanan dan inovasi dari barang/jasa yang diproduksi harus memiliki hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan keunggulan kompetitif jika telah menciptakan kepuasan pelanggan (Syapsan, 2019). Dibutuhkan kualitas layanan yang unggul dan inovasi dalam produk atau pelayanan kepada pelanggan juga memainkan peran penting dalam membangun loyalitas pelanggan, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Ketika pelanggan merasa puas dengan layanan dan produk yang diterima, akan muncul kecenderungan bagi pelanggan untuk melakukan kembali membeli berulang dan merekomendasikan usaha tersebut kepada kerabat atau orang di sekitarnya. Hal ini menciptakan efek domino yang tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga memperluas pangsa pasar UMKM.

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan tujuan pemberdayaan UMKM yaitu: (1) Meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Kemampuan UMKM dalam menyerap tenaga lokal, terutama di daerah kurang berkembang dan belum dijangkau oleh perusahaan besar dapat mengurangi pengangguran dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang merata; (2) Meningkatkan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Peningkatan kinerja dan produktivitas UMKM akan dapat meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional. (3) meningkatkan kapasitas produksi dan inovasi produk UMKM. Peningkatan kapasitas produksi dan inovasi adalah kunci dari keberlangsungan usaha dan meningkatkan daya saing kompetitif di pasar; dan (4) meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. UMKM yang berdaya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelakunya. Sehingga diharapkan muncul ekosistem bisnis yang lebih dinamis dan berkelanjutan yang akan meningkatkan stabilitas ekonomi lokal.

#### **Ways (Cara)**

Pelatihan yang berkelanjutan untuk pelaku UMKM dalam bidang manajemen bisnis, pemasaran digital, keuangan, dan inovasi produk sangat penting untuk meningkatkan kapasitas mereka. Literasi keuangan merupakan pilar utama dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. Pemahaman yang mendalam terhadap konsep pengelolaan keuangan memberikan landasan yang kokoh bagi UMKM dalam merencanakan anggaran, mengelola arus kas, dan membuat keputusan keuangan yang lebih tepat (Setyawati dkk., 2023). Literasi keuangan yang diberikan berupa keterampilan praktis serta merupakan media untuk membantu membuat keputusan keuangan yang bertanggung jawab dan berwawasan ke depan. Selain itu literasi keuangan dapat membantu UMKM dalam membuat keputusan keuangan yang efektif dan dapat memitigasi segala risiko keuangan yang akan terjadi (Nurwulandari, 2022). Literasi yang dibutuhkan dapat berupa perencanaan bisnis, penyusunan rencana keuangan dan cara menyusun keputusan investasi strategis. Keahlian ini tidak hanya memperkuat pertumbuhan bisnis, tetapi juga menyediakan dasar bagi kelangsungan bisnis jangka panjang (Sanistasya dkk., 2018). Pelatihan berkelanjutan dalam bidang manajemen bisnis, pemasaran digital, keuangan, dan inovasi produk sangat penting untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Literasi keuangan menjadi elemen utama yang mendukung pemberdayaan UMKM di Indonesia, karena memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan keuangan, yang berfungsi sebagai landasan kokoh dalam perencanaan anggaran, pengelolaan arus kas, dan pengambilan keputusan keuangan yang tepat.

Setelah memberikan pelatihan yang berkelanjutan, perlu juga untuk memfasilitasi akses pasar yang lebih luas, melalui platform digital dan kemitraan dengan perusahaan besar agar UMKM dapat mengembangkan pangsa pasar mereka. Digitalisasi adalah hal utama yang harus dilakukan untuk pengembangan akses pasar. Usaha UMKM yang telah menggunakan platform digital dalam melaksanakan usahanya dapat memperoleh jangkauan terhadap pelanggan yang lebih luas. Penerapan digitalisasi dalam lini perluasan akses pasar terbukti menghasilkan banyak prospek yang sebelumnya tidak diperoleh (Halida & Wilantini, 2022). UMKM perlu dihimpun dengan kategori usaha yang sejenis untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan besar dalam rangka menghemat biaya produksi. Perusahaan dapat berperan sebagai penyedia bahan ataupun menjadi bagian dari distribusi dari produk yang dihasilkan oleh UMKM. UMKM yang memiliki jaringan bisnis yang solid akan memiliki fondasi untuk menjalankan aktivitas operasionalnya dengan cara yang efisien dan efektif, sehingga jaringan bisnis tersebut juga berperan sebagai aset utama dalam persaingan perusahaan. (Irawan, 2020). Digitalisasi memungkinkan UMKM untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan menciptakan prospek baru yang sebelumnya tidak ada. Kemitraan dengan perusahaan besar dapat membantu mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan jaringan usaha yang kuat, UMKM dapat menjalankan operasi bisnis mereka dengan lebih efektif dan efisien, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing mereka di pasar.

Apabila akses pasar telah diperluas maka diperlukan teknologi bagi pelaku UMKM dalam rangka peningkatan efisiensi, produktivitas dan daya saing usaha. Menguasai teknologi tidak sekadar

pemanfaatan perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam terhadap perkembangan tren teknologi serta implementasinya dalam dunia bisnis (Wulandari dkk., 2024). Digitalisasi seluruh proses bisnis yang dilakukan oleh UMKM dari proses hulu ke hilir, tidak hanya untuk kebutuhan pemasaran namun dalam hal pencatatan transaksi atau operasional UMKM perlu didigitalisasi. Digitalisasi UMKM adalah inisiatif untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT) dalam aspek produksi, manajemen keuangan, serta strategi pemasaran (Suliswanto & Rofik, 2019). Untuk itu perlu dilakukan pelatihan terhadap pelaku UMKM agar memahami segala hal yang berbau digital. Program pendidikan tentang literasi digital berperan sebagai pemicu bagi UMKM untuk meningkatkan produk daerah, memperbesar akses pasar melalui platform media sosial, serta menumbuhkan semangat di kalangan pengusaha UMKM (Rauf dkk., 2018). Digitalisasi keseluruhan proses bisnis, mulai dari produksi hingga pemasaran dan pencatatan transaksi, sangat penting untuk meningkatkan operasional UMKM. Upaya digitalisasi ini termasuk pemanfaatan teknologi berbasis Internet of Things (IoT), yang mencakup produksi, pengelolaan keuangan, dan pemasaran.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan dan ekspansi usaha, meningkatkan akses UMKM ke sumber pembiayaan formal merupakan langkah krusial. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan fasilitasi hubungan antara UMKM dan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya, sehingga mereka dapat lebih mudah mengakses berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan. Selain itu, pengenalan skema pembiayaan mikro menjadi solusi yang sangat relevan, karena skema ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan modal usaha kecil dengan proses yang lebih sederhana dan persyaratan yang lebih fleksibel. Akses terhadap keuangan merupakan perhatian utama bagi UMKM di negara-negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang didasarkan pada pengembangan UMKM (Rajamani dkk., 2022). Di sisi lain, perkembangan teknologi finansial (fintech) juga membuka peluang baru bagi UMKM untuk mendapatkan modal. Melalui platform fintech, UMKM dapat mengajukan pinjaman dengan cepat dan mudah, tanpa harus melalui prosedur yang rumit. Dengan adanya berbagai opsi pembiayaan ini, diharapkan UMKM dapat lebih berdaya saing, memperluas usaha, dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Fintech berbasis syariah memberikan kesempatan bagi UMKM untuk menjangkau lebih banyak pelanggan serta mempermudah proses transaksi melalui layanan keuangan yang memiliki cakupan lebih luas (Khoiriyah & Ansori, 2024). Salah satu pendekatan yang efektif adalah dengan memfasilitasi hubungan antara UMKM dan lembaga perbankan atau keuangan, sehingga mereka dapat dengan mudah mengakses berbagai produk pembiayaan yang tersedia. Skema pembiayaan mikro juga menjadi solusi relevan karena dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan modal usaha kecil dengan proses yang lebih sederhana dan persyaratan lebih fleksibel.

Cara krusial terakhir adalah mendorong terciptanya regulasi yang mendukung keberlanjutan UMKM adalah langkah penting yang perlu diambil untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan merancang kebijakan perpajakan yang lebih ramah bagi pelaku UMKM. Dengan memberikan insentif pajak atau pengurangan beban pajak, pemerintah akan membantu para pelaku UMKM untuk lebih fokus pada pengembangan usaha tanpa terbebani oleh kewajiban yang terlalu berat. Selain itu, penyederhanaan proses perizinan usaha juga sangat diperlukan. Banyak UMKM yang terhambat untuk berkembang karena birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Dengan mengurangi langkah-langkah yang tidak perlu dalam pengurusan izin, pemerintah dapat memberi kesempatan bagi para pelaku usaha untuk lebih cepat berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Regulasi yang tidak jelas dan terlalu rumit menjadi kendala yang menghambat UKM dalam mengimplementasikan teknologi (Rizal dkk., 2022). Semua ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan UMKM, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak bagi masyarakat. Kebijakan perpajakan yang lebih ramah bagi UMKM, seperti insentif pajak atau pengurangan beban pajak, dapat membantu pelaku UMKM fokus pada pengembangan usaha tanpa terbebani oleh kewajiban yang terlalu berat. Penyederhanaan proses perizinan usaha juga sangat diperlukan untuk mengurangi hambatan birokrasi yang sering kali menghalangi perkembangan UMKM.

#### **Means (Sumber Daya)**

Pemerintah dan lembaga keuangan harus menyiapkan dana khusus untuk membantu UMKM. Dana ini bisa digunakan untuk berbagai hal, seperti pelatihan yang membantu pemilik usaha belajar keterampilan baru, membangun infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, dan memberikan akses yang lebih mudah ke sumber pembiayaan. Pelatihan literasi digital berperan sebagai pendorong bagi UMKM untuk mengembangkan produk lokal, memperluas jangkauan pasar melalui pemanfaatan media sosial, serta meningkatkan motivasi para pelaku usaha (Rauf dkk., 2018). Dengan

adanya anggaran ini, diharapkan UMKM dapat berkembang lebih baik, meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Dukungan yang tepat dari pemerintah dan lembaga keuangan akan sangat membantu usaha kecil untuk tumbuh dan bersaing di pasar. Stimulus fiskal menjadi salah satu langkah kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Saat ini, pemerintah menetapkan tarif PPh final sebesar 0,5% bagi pelaku UMKM dengan omzet di bawah 4,8 Miliar dan dibebaskan dari PPh untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp500juta. Stimulus fiskal berperan penting sebagai kebijakan *counter-cyclical* untuk memulihkan stabilitas perekonomian yang tengah mengalami resesi atau krisis (Lativa, 2021). pemerintah dan lembaga keuangan perlu menyediakan dana khusus untuk mendukung UMKM dalam berbagai aspek, seperti pelatihan keterampilan, pembangunan infrastruktur, dan akses pembiayaan. Pelatihan literasi digital sangat penting untuk membantu UMKM mengembangkan produk lokal, memperluas pasar melalui media sosial, dan meningkatkan motivasi pelaku usaha. Dengan dukungan finansial yang tepat, UMKM dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Kebijakan stimulus fiskal juga berperan penting sebagai langkah *counter cyclical* dalam mengatasi resesi atau krisis ekonomi, sekaligus mempercepat pembangunan ekonomi.

Infrastruktur yang baik sangat diperlukan untuk mendukung UMKM, seperti akses internet yang cepat dan terjangkau di semua daerah. Dengan internet yang merata, semua pelaku usaha kecil bisa terhubung dengan pelanggan dan pasar yang lebih luas. Pemerintah dapat bekerja sama dengan swasta dalam hal penyediaan infrastruktur digitalisasi dan memberikan kesadaran melalui sosialisasi kepada pelaku UMKM untuk melaksanakan digitalisasi pada usahanya. Digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan pasar, mengoptimalkan efisiensi proses produksi serta manajemen, dan mendorong terbentuknya segmentasi pasar yang baru (Suliswanto & Rofik, 2019). Selain itu, penting juga untuk menyediakan platform teknologi yang mudah digunakan oleh UMKM. Platform ini bisa membantu mereka dalam melakukan pemasaran, menjual produk, atau mengelola keuangan usaha mereka. Dengan adanya infrastruktur yang baik, UMKM akan lebih mudah berkembang dan bersaing di dunia usaha. Digitalisasi tidak hanya mendukung UMKM untuk tetap eksis di tengah persaingan bisnis yang terus berubah, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi inovasi dan pengembangan usaha (Rauf dkk., 2018). Peran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan mendukung digitalisasi sangat krusial, demikian pula peran swasta dalam inovasi dan penyediaan teknologi yang relevan bagi UMKM. Kombinasi peran ini akan memastikan UMKM dapat berkembang dengan optimal dan bersaing di pasar global.

Pemberdayaan UMKM adalah usaha yang memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Setiap pihak memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Pemerintah bisa memberikan dukungan melalui kebijakan yang ramah terhadap usaha kecil, sementara sektor swasta dapat berkontribusi dengan memberikan akses ke pasar dan sumber daya. Insentif pajak bagi UMKM cukup efektif meskipun dampaknya lebih kecil karena beban pajak terbesar dari suatu UMKM bukan berasal dari peredaran usaha, tetapi berasal dari transaksi yang terkait dengan pajak pertambahan nilai (Faisol & Hakim, 2021). Lembaga pendidikan juga bisa berperan dengan menyediakan pelatihan dan pengetahuan yang diperlukan agar para pelaku UMKM dapat mengembangkan keterampilan mereka. Di sisi lain, masyarakat juga bisa mendukung dengan memilih produk lokal dan memberikan umpan balik yang konstruktif.

#### 4. Kesimpulan

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan strategi krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan peran UMKM sebagai pencipta lapangan kerja, pendorong Produk Domestik Bruto (PDB), pusat inovasi, dan fondasi kesejahteraan ekonomi lokal.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup beberapa pilar utama yaitu: Peningkatan Kapasitas Manusia (Memberikan pelatihan berkelanjutan dalam manajemen bisnis, literasi keuangan, dan pemasaran digital); Perluasan Akses (Membuka akses yang lebih luas ke pasar melalui digitalisasi dan kemitraan, serta ke sumber pembiayaan formal seperti perbankan dan fintech); dan Dukungan Ekosistem (Mendorong adopsi teknologi di seluruh proses bisnis dan menciptakan regulasi yang mendukung, seperti penyederhanaan perizinan dan insentif pajak).

Implementasi strategi ini mutlak memerlukan komitmen sumber daya yang konkret, yaitu alokasi dana khusus, pembangunan infrastruktur digital yang merata, serta sinergi kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pada intinya, keberhasilan pemberdayaan UMKM adalah kunci untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

## 5. Keterbatasan Dan Saran

Penelitian ini memperluas penerapan teori strategi Lykke dalam konteks pembangunan ekonomi nasional. Meskipun penelitian ini berhasil merumuskan kerangka strategi pemberdayaan UMKM, terdapat batasan mendasar pada aspek metodologi. Kajian ini sepenuhnya bertumpu pada sintesis literatur dan data sekunder, sehingga belum menyentuh ranah verifikasi langsung di lapangan. Akibatnya, tingkat keberhasilan implementasi strategi yang ditawarkan masih bersifat konseptual dan belum teruji menghadapi kendala teknis yang mungkin muncul dalam situasi riil di lapangan. Berdasarkan keterbatasan tersebut, peneliti merekomendasikan arah penelitian selanjutnya sebagai berikut:

- Penelitian mendatang perlu melangkah dari sekadar kajian pustaka menuju validasi lapangan. Pengumpulan data primer melalui wawancara atau kuesioner kepada pelaku UMKM sangat diperlukan untuk mengukur efektivitas strategi ini secara praktis.
- Mengingat temuan saat ini masih berlaku umum, disarankan untuk melakukan analisis perbandingan (komparasi) antar sektor atau wilayah. Peneliti selanjutnya dapat membandingkan dampak strategi ini pada UMKM di daerah perkotaan versus pedesaan, atau membedah perbedaannya pada sektor kuliner dibandingkan sektor jasa. Hal ini penting untuk melihat apakah satu strategi cocok untuk semua kondisi atau memerlukan adaptasi khusus.

## Bibliografi

- Faisol, I. A., & Hakim, T. I. R. (2021). Analysis of Participation of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Taxpayers in Utilizing Tax Incentives Affected by the COVID-19 Pandemic. *The International Journal of Applied Business*, 5(1), 71–80.
- Halida, U. M., & Wilantini, C. (2022). The Role of Digitalization in Expanding MSME Market Access. *Quantitative Economics and Management Studies*, 3(1), 92–101. <https://doi.org/10.35877/454ri.qems861>
- Hidayat, A., Lesmana, S., & Latifah, Z. (2022). Peran UMKM (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(MSME), 6707–6713.
- Irawan, D. (2020). Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Jaringan Usaha. *Cooprition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, XI(MSME), 103–115.
- Khoiriyah, A., & Ansori, M. (2024). Peran Fintech Peer to Peer Lending Syariah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM di Indonesia. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(4), 1434–1445. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i4.1586>
- Lativa, S. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19 Dalam Meningkatkan Perekonomian. Dalam *Jurnal Ekonomi* (Vol. 23, Nomor 3).
- Mankiw, N. G., Quah, E., & Wilson, P. (2014). *Principles of Economics an Asian Edition* (Vol. 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Nurwulandari, A. (2022). The Effect Of Financial Inclusion And Financial Literacy On Msme Financial Performance. *Jurnal Infokum*, 10, 1344–1350.
- Rajamani, K., Jan, N. A., Subramani, A. K., & Raj, A. N. (2022). Access to Finance: Challenges Faced by Micro, Small, and Medium Enterprises in India. *Engineering Economics*, 33(1). <https://doi.org/10.5755/j01.ee.33.1.27998>
- Rauf, R., Syam, A., & Fuad Randy, M. (2018). Optimalisasi Transformasi Digital Dalam Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Indonesia. Dalam *Bongaya Journal of Research in Management* (Vol. 7, Nomor 1).
- Rizal, M., Kusnanto, E., & Ruslani. (2022). Peran Regulasi dalam Mendorong Adopsi Cloud Computing UMKM DKI Jakarta. *Journal of Business Finance and Economic (JBFE)*, 3(1).
- Sanistasya, P. A., Rahardjo, K., & Iqbal, M. (2018). Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Kecil di Kalimantan Timur. Dalam *Jurnal Economia* (Vol. 14, Nomor 1).
- Saputro, G. E., & Meirinaldi. (2021). Pengaruh Stabilitas Makro Ekonomi, Stabilitas Keamanan Dan Pertumbuhan Industri Strategis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi*, 23(Macroeconomic).
- Setyawati, A., Sudarmiatin, S., & Wardana, L. W. (2023). Empowering MSMEs: The Impact Of Financial Literacy And Inclusion. *International Journal of Economics and Management Research*, 2(3), 121–138. <https://doi.org/10.55606/ijemr.v2i3.132>
- Suliswanto, M. S., & Rofik, M. (2019). The Impacts Of Afta-Common Effective Preferential Tariffs On The Trade Diversion And Trade Creation Of Synthetic Rubber And Factice From Oil In Indonesia. *Economics and Business*, 2(2), 34–43.

CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia

Vol 5, No. 6, 2025

ISSN: 2807-5994

<https://journal.das-institute.com/index.php/citizen-journal>



Wulandari, A., Dompok, T., & Salsabila, L. (2024). Transformasi Digital UMKM Studi Kasus Strategi Adopsi Teknologi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 6(1).  
<https://doi.org/10.31539/joppas.v6i1.11117>